

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA**

Jl. Pamularsih No. 28 Semarang Kode Pos 50148 Telepon 7602952 Fax. 7622536  
e-mail : dpppadaldukkb@jatengprov.go.id website : dp3akb.jatengprov.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dra. Sri Dewi Indriati, MM

Jabatan : Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan  
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,  
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi  
Jawa Tengah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dra. Retno Sudewi, Apt, M.Si. MM

Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,  
Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi  
Jawa Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, Januari 2024

Pihak Kedua

Kepala Dinas Pemberdayaan  
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian  
Penduduk dan Keluarga Berencana  
Provinsi Jawa Tengah

**Dra. Retno Sudewi, Apt, M.Si. MM**

Pembina Utama Madya ✓

NIP. 19681124 199310 2 00 1

Pihak Pertama

Kepala Bidang Kesetaraan  
Gender dan Perlindungan  
Perempuan

**Dra. Sri Dewi Indriati MM**

Pembina Tingkat I

NIP. 19670128 198603 2 00 2

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Unit kerja : Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan cakupan program PPEP di daerah	Persentase kabupaten/kota yang mereplikasi peningkatan produktivitas ekonomi perempuan (PPEP) atau program pemberdayaan ekonomi perempuan	60 %
2	Perlindungan Perempuan	Persentase kabupaten/kota yang menyediakan layanan perlindungan perempuan sesuai standar	11 %
3	Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase kabupaten/kota yang menyediakan layanan kualitas keluarga terstandar	14,29 %

Program	Anggaran	Keterangan
1. Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp 1.375.000.000	APBD
2. Perlindungan Perempuan	Rp 858.350.000	APBD

3. Peningkatan Kualitas Keluarga


Rp

100.000.000

APBD

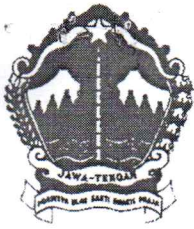
Semarang, Januari 2024

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,  
Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk  
dan Keluarga Berencana  
Provinsi Jawa Tengah

  
**Dra. Retno Sudewi Apt, M.Si, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19681124 199310 2 00 1

Kepala Bidang  
Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan

  
**Dra. Sri Dewi Indrajati MM**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19670128 198603 2 00 2



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA**

Jl. Pamularsih No. 28 Semarang Kode Pos 50148 Telepon 7602952 Fax. 7622536  
e-mail : dpppadaldukkb@jatengprov.go.id website : dp3akb.jatengprov.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Melati Diah Pamungkas, SE,MM

Jabatan : Ketua Kelompok Kerja Kesetaraan Gender

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian  
Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dra. Sri Dewi Indrajati MM

Jabatan : Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian  
Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Kebhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, Januari 2024

Pihak Kedua

Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan  
Perlindungan Perempuan

  
**Dra. Sri Dewi Indrajati,MM**

Pembina Tingkat I

NIP. 19670128 198603 2 00 2

Pihak Pertama

Ketua Kelompok Kerja  
Kesetaraan Gender

  
**Melati Diah Pamungkas, SE,MM**

Penata Tingkat I

NIP. 19850516 200901 2 010

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Unit kerja : Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>1</b>	<b>Meningkatnya OPD yang menganggarkan ARG</b>	<b>Persentase Anggaran Responsif Gender di OPD Provinsi</b>	<b>10 %</b>
1.1	Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG)	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG tingkat provinsi	4 Laporan
1.2	Meningkatnya perangkat daerah yang mengikuti advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG	Jumlah SDM tingkat Provinsi yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	80 Dokumen
1.3	Meningkatnya jumlah peserta sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Provinsi	55 Orang
<b>2</b>	<b>Meningkatnya pemahaman perempuan dalam bidang politik dan ekonomi</b>	<b>Persentase perempuan yang mengikuti kegiatan pemberdayaan perempuan di bidang politik dan ekonomi meningkat pemahamannya</b>	<b>70 %</b>
2.1	Meningkatnya pemahaman perempuan tentang pendidikan politik	Jumlah pengelola organisasi kemasyarakatan/profesi/dunia usaha/media tingkat provinsi yg mengikuti peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan	290 Orang

		partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	
2.2	Meningkatnya kesejahteraan perempuan rentan	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media tingkat provinsi yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	6 Kelompok
3	<b>Meningkatnya layanan keluarga yang responsif gender dan anak</b>	<b>Persentase Keluarga yang mendapat Layanan Keluarga (Edukasi, Konsultasi, dan Konseling) yang responsif gender dan anak</b>	<b>100 %</b>
3.1	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pewujudan KG dan perlindungan anak	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	10 OPD

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Rp 48.430.000	APBD
2. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Rp 82.640.000	APBD
3. Sosialisasi kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Rp 49.395.000	APBD
4. Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Rp 1.149.535.000	APBD
5. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Rp 45.000.000	APBD
6. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Rp 100.000.000	APBD

Semarang, Januari 2024

Kepala Bidang  
Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan

  
**Dra. Sri Dewi Indrajati, MM**

Pembina Tingkat I

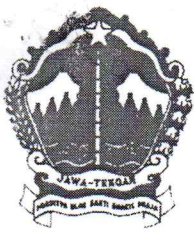
NIP. 19670128 198603 2 00 2

Ketua Kelompok Kerja Kesetaraan Gender

  
**Melati Diah Pamungkas, SE, MM**

Penata Tingkat I

NIP. 19850516 200901 2 010



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA**

Jl. Pamularsih No. 28 Semarang Kode Pos 50148 Telepon 7602952 Fax. 7622536  
e-mail : dpppadaldukkb@jatengprov.go.id website : dp3akb.jatengprov.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Asteria Dewi Rusrinawati,S.Psi,M.Psi

Jabatan : Ketua Kelompok Kerja Perlindungan Perempuan Dinas  
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian  
Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dra. Sri Dewi Indrajati MM

Jabatan : Kepala Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan  
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian  
Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, Januari 2024

Pihak Kedua  
Kepala Bidang Kualitas Hidup dan  
Perlindungan Perempuan

  
**Dra. Sri Dewi Indrajati,MM**

Pembina Tingkat I

NIP. 19670128 198603 2 00 2

Pihak Pertama  
Ketua Kelompok Kerja  
Perlindungan Perempuan

  
**Asteria Dewi Rusrinawati,S.Psi,M.Psi**

Pembina

NIP. 19720814 1999012 001

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Unit kerja : Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	<b>Meningkatnya Pemda yang menyusun Perda pencegahan kekerasan pada perempuan</b>	<b>Persentase Pemda yang mempunyai kebijakan pencegahan kekerasan pada perempuan</b>	<b>43 %</b>
1.1	Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, Program dan Kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	2 Dokumen
2.2	Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	2 OPD
2	<b>Meningkatnya kualitas lembaga layanan perlindungan perempuan yang ditingkatkan</b>	<b>Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang difasilitasi penguatan dan pengembangannya</b>	<b>10 Kelompok</b>


2.1	Meningkatnya kab/kota yang didampingi penyediaan sarana prasarana layanan bagi perempuan	Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	3 Dokumen
2.2	Meningkatnya pemahaman peserta lembaga penyedia layanan kekerasan pada perempuan	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	10 Orang
2.3	Meningkatnya kegiatan bagi perempuan dalam situasi darurat	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan provinsi yang Mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik	100 Orang
2.4	Meningkatnya kab/kota yang didampingi penyediaan sarana prasarana layanan bagi perempuan	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Rp 50.750.000	DAK- NF
2. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Rp 75.000.000	APBD
3. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Rp 50.000.000	APBD
4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Rp 100.000.000	APBD & DAK-NF
5. Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	Rp 30.000.000	APBD

6. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Rp 552.600.000 APBD  
Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas  
Daerah Kabupaten/Kota

Semarang, Januari 2024

Kepala Bidang  
Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan



Dra. Sri Dewi Indrajati, MM  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19670128 198603 2 00 2

Ketua Kelompok Kerja  
Perlindungan Perempuan



Asteria Dewi Rusrinawati, S.Psi, M.Psi  
Pembina  
NIP. 19720814 1999012 001